

**PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF MOHAMMAD HATTA
(STUDI KASUS DI DESA SIMPANG TANJUNG KECAMATAN
BELIMBING KABUPATEN MUARA ENIM)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**

Oleh:

Yuni Anggraini

15 33 4000 81



**PRODI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2020 M/ 1442 H**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, serta sarana dan prasarana pemerintahan. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran desa dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih ini dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.¹

Salah satu persyaratan pembentukan desa yaitu adanya pemerintah desa, Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala Desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan dipilih langsung oleh dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala Desa yang sudah menduduki jabatan hanya boleh menduduki satu kali masa jabatan berikutnya. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, kepala desa pada dasarnya bertanggung

¹ Amir, Mahmud, *Negara Dengan bentuk Pemerintahan Demokrasi*, 2013), him. 36

jawab kepada rakyat. Pemilihan kepada desa bentuk dari silaturahmi, dalam pelaksanaannya pilkades harus dijadikan sebagai wahana interaksi verbal dan non verbal bagi semua elemen masyarakat di desa tersebut. Interaksi yang dalam dimensi religius bermakna silaturahmi harus muncul sebagai pemaknaan atas konstalasi politik tingkat desa.

Kepala Desa wajib menyampaikan informasi mengenai pokok-pokok pertanggung jawabannya. Kepala Desa mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban serta berhak atas gaji dan tunjangan, jaminan kesehatan, bantuan hukum, cuti dan mendapat penghargaan atau prestasi kerjanya, selanjutnya dalam rangka penguatan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan wajib melaksanakan pembinaan kepada Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil.

Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 Desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadatnya. Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut desa dapat membuat peraturan desa. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.²

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari kepala desa, Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih masyarakat desa yang sudah mempunyai hak memilih. Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa. Partisipasi pada

² Undang-undang Nomor.32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga Negara dalam menginterpretasikan sejumlah symbol kekuasaan.

Umumnya minat masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades), karena sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, namun bagi sebagian masyarakat lain adanya paksaan dari salah satu kandidat calon kepala desa melalui tim suksesnya dengan membagikan kaos dan stiker serta adanya tekanan-tekanan para team kandidat yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan berlangsung. Para team kandidat itu memberikan uang kepada sebagian masyarakat agar memilih calon yang disuruh oleh team kandidat, banyak sekali masyarakat yang mengikuti keinginan para team kandidat untuk memilih salah satu calon karena telah diberikan imbalan sebelum masuk kedalam bilik suara. Selain itu ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih calon kepala desa karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon.³

Selain ikut dalam aktivitas pada pelaksanaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) menjadi partisipan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan menjadi pengamat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, ada juga masyarakat menjadi orang yang *apathies* terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Orang *apathies* tersebut benar-benar tidak peduli tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) baik dari tahap pencalonan maupun tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa syarat dan kepentingan dari berbagai pihak yang semuanya bermuara pada kekuasaan dan uang. Oleh karena itu pihak dimaksud pastilah tidak tinggal diam apabila dalam prosesnya terdapat hal-hal yang mengancam dan merugikan kepentingan mereka.

Tentu saja mereka akan melakukan berbagai cara untuk melindungi kepentingannya misalnya protes terhadap panitia, tuntutan Pemilihan Kepala Desa ulang, pengaduan terhadap

³ Heri, Kusmanto, *Desa Tertekan Kekuasaan*. (Medan: Bitra Indonesia. 2007), him. 43

pihak berwenang, mengadukan kepada pihak berwajib apabila diyakini terdapat kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Mereka juga tidak segan segan membuat kekacauan/keributan. Bahkan melakukan tindakan pengerahan massa untuk memaksakan tuntutan mereka melalui unjuk rasa baik yang diarahkan kepada panitia, kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Camat maupun Bupati.⁴

Asas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (2) PP No. 72 tahun 2005 sama persis dengan asas pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen. Dari sisi persyaratan pemilihan juga dapat dikatakan sama antara pemilihan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa), dan pemilihan dalam pemilu, termasuk dalam mekanisme penggunaan hak pilih, persyaratan dan tata cara pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan Panitia penyelenggaraan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa). Pada penjelasan ini terdapat pada undang-undang yang menyatakan pemilihan kepala desa merupakan sistem politik dalam masyarakat, namun disini peneliti ingin melihat pemilihan kepala desa ditinjau dari Muhammad Hatta. Politik menurut Mohammad Hatta adalah politik yang mementingkan kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat disini berarti bahwa kekuasaan untuk sebuah pemerintahan suatu bangsa dan negara ada pada rakyat yang mana rakyat yang berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana harus diperintah. Kedaulatan rakyat memberi kekuasaan yang tertinggi kepada rakyat dan meletakkan tanggung jawab yang terbesar, dasar pemerintahan yang adil ialah, siapa yang mendapat kekuasaan dia itulah yang bertanggungjawab. Aristoteles pernah berkata, bahwa pemerintahan negara yang bersifat pemerintahan rakyat lebih kuat pertahanannya revolusi daripada pemerintahan yang berdasar kekuasaan satu golongan yang

⁴ Adam, *Tentang Dampak Negatif dari Penduduk Desa*, (Bandung: Rosdakarya, 2020), him. 38

terkecil.⁵ Dan pemerintahan yang berdasar kepada kedaulatan rakyat pada hakikatnya lebih teguh, karena dijunjung oleh tanggungjawab bersama.

Menurut Amir Mahmud, mengatakan bahwa Negara (dengan bentuk pemerintahan) demokrasi adalah Negara yang di selenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia (demokrasi) berarti pengorganisasian yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Demokrasi merupakan suatu bentuk politik yang secara umum memiliki arti sebagai suatu politik pemerintahan yang di tentukan oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa saja mereka yang memiliki kekuasaan dan berhak untuk memerintah. Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Indonesia mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Kualitas demokrasi sebenarnya didasarkan pada banyak hal, khususnya menyangkut tentang transparansi anggaran, partisipasi kelembagaan lokal, dan akomodasi kepentingan masyarakat di dalam pengambilan keputusan atau peraturan di daerah. Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinnya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis yakni akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapat hak pilih, perlindungan bagi tiap individu terhadap pengaruh suara, dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara.⁶

Dan semenjak lahirnya gerakan Reformasi tahun 1998, membawa dampak yang sangat luas dalam tata kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Di era orde baru, penyelenggaraan pemerintahan berjalan hanya semata-mata mengikuti kehendak penguasa dengan menjadikan birokrasi kekuasaan di pusat-pusat pemerintahan sebagai ujung tombak utama dengan mengabaikan berbagai potensi yang ada di masing-masing daerah.

⁵ Mohammad hatta, *Demokrasi Kita*, (Bandung, Segarsy, 2008, cet ke-4), him 52

⁶ Rachmad K Dwi Susilo, *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006), him. 180

Dampak langsung dari penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah semakin seragam potensi dan kepentingan daerah. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka berakhirilah penyelenggaraan pemerintahan desa yang didasarkan pada Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan jiwa UUD 1945, khususnya yang menyangkut hak asal usul daerah yang bersifat istimewa, sehingga perlu diganti.

Adapun landasan pemikiran dari undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan rumusan tersebut, Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 mengisyaratkan dan menghendaki bahwa pemerintahan desa (berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979) diganti dengan pemerintahan desa berdasarkan adat istiadat dan asal usul daerah yang bersifat istimewa. Namun demikian penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut tetap merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kepada desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga masyarakatnya.⁷

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan Desa Simpang Tanjung merupakan salah satu desa di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. di Desa Simpang Tanjung merupakan salah satu proses pemilihan kepala desa yang akan berlangsung seru dalam arena perpolitikan. Hal ini dapat dilihat pada saat sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa, para calon kepala Desa Simpang Tanjung berkompetisi untuk mencari

⁷ *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 & Petunjuk Pelaksanaan*. 2000. Jakarta: Sinar Grafika. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

dukungan massa sebanyak-banyaknya dengan cara menjanjikan sesuatu kepada warga desanya atau dengan *me-lobby* warga desa simpang tanjung.

Desa simpang tanjung merupakan salah satu desa yang mulai berkembang di kabupaten Muara Enim yang mulai menjadi pusat perhatian pemerintah. Dengan adanya peristiwa pemilihan Kepala Desa Simpang Tanjung tersebut menimbulkan kompetisi atau persaingan antar Calon Kepala Desa Simpang Tanjung.

Masing-masing Calon Kepala Desa simpang tanjung saling menyebarkan pengaruhnya kepada warga Desa untuk mendapatkan dukungan sehingga warga desa akan memilihnya menjadi Kepala Simpang Tanjung. Upaya untuk menarik simpati dari warga Desa, Calon Kepala Desa Simpang Tanjung akan mendekatinya dengan menjalin silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa seperti tokoh agama, kalangan pemuda-pemudi dan kerabat-kerabatnya. Upaya calon kepala desa tersebut dibarengi dengan janji-janji yang nantinya setelah terpilih menjadi Kepala Desa, maka harus merealisasikannya.

Mohammad Hatta tidak menjadikan islam harus mengisi kehidupan politik secara formal, tetapi menginginkan nilai-nilainya masuk dan merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hatta mencoba melirik islam sebagai dasar bagi pengaturan politik dan bernegaraan. Mohammad Hatta selama ini dikenal sebagai sosok yang memperlihatkan hubungan (relasi) yang terpisah antara agama dan politik. Karena hatta merupakan orang yang bertanggungjawab dalam peranannya sebagai tokoh masyarakat untuk menentukan aspek antara agama dan politik. Untuk itu pemilihan kepala desa dapat dikembangkan atau dapat menjadi pedoman dalam menentukan apakah pemilihan kades di Desa simpang belimbing sesuai dengan kejujuran, bertanggung jawab, tidak mengubar janji, namun

melakukan tugas sesuai dengan kemampuan serta lebih mengutamakan kenyataan seperti yang dilakukan oleh tokoh kita Muhammad Hatta dalam melaksanakan tugasnya.

Sehubungan dengan adanya fenomena yang dikemukakan diatas maka peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kepemimpinan yang dilakukan oleh Muhammad Hatta untuk itu peneliti ingin menganalisa mengenai judul: **Pemilihan Kepala Desa Perspektif Mohammad Hatta (*Studi Kasus di Desa Simpang Tanjung Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim*)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu :

1. Bagaimana pemilihan kepala desa perspektif Mohammad Hatta di desa Simpang Tanjung Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana relevansi perpektif Mohammad Hatta terhadap pemilihan kepala desa di Desa Simpang Tanjung Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana Pemilihan Kepala Desa Perspektif Mohammad Hatta di Desa Simpang Tanjung Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim.

2. Manfaat Penulisan Skripsi

- a. Sebagai sumbangan bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya, dan bagi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia khususnya.
- b. Sebagai sumbangan karya ilmiah bagi perkembangan dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang dan masyarakat pada umumnya.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Raden Fatah Palembang.
- d. Untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan telaah atas berbagai karya baik berupa buku-buku Ilmiah, skripsi, tesis, jurnal, ataupun sumber ilmiah lain dan berpendapat belum ada kajian mengenai etika pemilihan kepada desa khususnya yang mengkaji di Desa Simpang Tanjung. Penulis beranggapan, ada beberapa literatur yang relevan dan dapat mendukung penelitian ini, yang akan penulis paparkan sebagai berikut :

Pertama, skripsi Mochamad Parmudi, yang berjudul *Perilaku Politik Bung Hatta (sebuah telaah etika politik)*, UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2017. Skripsi ini juga sama-sama menjelaskan tentang suatu etika yang berkaitan dengan politik yang diusung oleh Bung Hatta, sedangkan penelitian yang penulis angkat yaitu, politik di desa simpang tanjung yang dikaitkan dengan perspektif Mohammad Hatta.

Kedua, skripsi Asep Muharudin yang berjudul *Pemikiran Politik Luar Negeri Mohammad Hatta*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 2009. Skripsi ini juga menjelaskan tentang pemikiran politik luar negeri Mohammad Hatta. Sedangkan penelitian yang penulis angkat tentang politik Mohammad Hatta.

Ketiga, skripsi Muhammad Yunus yang berjudul *Pemilihan Kepada Desa Serentak tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)* UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ushuluddin Filsafat. Skripsi ini menjelaskan tentang suatu fenomena pemilihan kepada desa yang dilakukan secara serentak yang mana antar calon kepala desa menghalalkan segala cara agar dapat terpilih. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai pemilihan kepala desa yang dikaitkan dengan politik Mohammad Hatta.

Keempat, Deliar Noer, dalam bukunya "*Mohammad Hatta Biografi Politik*" didalam buku tersebut, menjelaskan masa kecil sampai masa studi diluar negeri, juga menjelaskan masa-perjuangan di tanah air, dari masa revolusi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, sampai orde baru. "Anda bukan seorang wartawan yang jujur Anda bersalah karena telah menyalahgunakan kepercayaan saya tak mau memaafkan anda tentang penyalahgunaan ini; ini berlawanan dengan sopan santun kewartawanan."⁸ Merupakan isi surat Hatta kepada Julles Huf, seorang wartawan *de telegraaf*, yang membahas kejelekan suasana tanah air, yang tak harus disebarluaskan dimanca negara, yang memuat soal Irian Barat, penyebarluasan berita dikarenakan kejengkelannya terhadap Soekarno, dan Hatta memahami wartawan hanya ingin mengadu domba Hatta dan Soekarno. Sepak terjang politik Hatta dikanca nasional maupun internasional dibahas didalam buku karangan Deliar Noer tersebut.

E. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefenisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode kualitatif ini digunakan karena jawaban terhadap permasalahan belum jelas, holistik, dinamis, kompleks, dan penuh makna sehingga tidak

⁸ Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1990), him. 583

mungkin pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif. Dengan model penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian dengan mengamati langsung kelokasi penelitian.⁹ Dalam penelitian ini peneliti mencari informasi yang menyangkut tentang etika pemilihan kepala desa di desa simpang tanjung dengan subjeknya secara langsung pengamatan dan wawancara.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yakni, sumber data primer dan data sekunder.¹⁰

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber- sumber asli.¹¹ Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini sumber primer berasal dari data-data wawancara saat pengumpulan data pada subjek sebagai sumber informasi,¹² yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa di Desa Simpang Tanjung Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau sumber data yang bersumber dari hasil rekonstruksi orang lain dan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), him. 22.

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), him. 81.

¹¹ M. Sitorus, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 2000), him. 81.

¹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Edisi 1 Cet 1, 1998), him. 91.

mendukung dalam pembahasan penelitian ini, seperti kajian yang berkenaan dengan penelitian ini baik dari buku, internet, majalah, *bulletin* dan hasil penelitian.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan disini ada 3 metode yaitu metode wawancara, metode Observasi partisipatif, metode dokumentasi. Sebagaimana diterangkan sebagai berikut:

a. Metode wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*be interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Metode ini dilakukan untuk mencari data dan informasi yang diperlukan se jelas-jelasnya dari informan yang bersangkutan.¹⁵

Mengutip dari Guba dan Lincoln menyatakan bahwa metode ini memang merupakan metode pengumpulan data yang khas bagi penelitian kualitatif. Jadi secara tidak langsung penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam.¹⁶

Wawancara terbagi menjadi tiga macam yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur dan wawancara terbuka tersandar, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah model pilihan jika pewawancara mengetahui apa yang tidak diketahuinya dan oleh karenanya dapat membuat apa yang tepat untuk memperoleh hasilnya.¹⁷ Dalam wawancara terstruktur pertanyaan dari

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), him. 187.

¹⁴ Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2007), him. 186.

¹⁵ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, Cet. Ke-3, 2013), him. 105.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), him. 218- 219.

¹⁷ Rulam Ahmadi, *Memahami metodologi penelitian kualitatif*, (Malang: Universitas Islam Malang, (UM Press), 2005), hlm. 73

pewawancara dan respon terletak pada responden. Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur untuk mendapatkan data tambahan dari 15 orang yang mewakili masyarakat saat pemilihan kepala desa di Desa Simpang Tanjung Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim tersebut selain data dokumentasi.

b. Metode Observasi

Observasi atau yang disebut dengan pengamatan, meliputi pemusatan terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indera. Metode ini digunakan dengan jalan mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam objek penelitian. disamping itu juga dapat menyaring data yang tidak objektif dari data yang dikemukakan oleh para responden melalui interview. Mengingat data yang dikemukakan oleh para responden melalui interview. Mengingat data yang didapat melalui wawancara terkadang dipengaruhi oleh sifat subjektivitas orang yang menyampaikan keterangan tersebut. Dengan demikian data yang diperoleh hasil kebenaran data yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menyalin dan mencatat langsung data yang ada pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data, dokumentasi yaitu memperoleh data yang bersumber pada dokumentasi atau arsip yang ada dilokasi penelitian, serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.¹⁹

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 146

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), him.

Populasi merupakan objek penelitian menjadi kualitas dan kuantitas dapat memperoleh hasil penelitian dengan mengumpulkan data dan mendapatkan kesimpulan dari perhitungan objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa simpang tanjung kecamatan belimbing kabupaten muara enim yang berjumlah 223 masyarakat.

b. Sampel

Karakteristik dengan sejumlah populasi yang dimiliki disebut sampel. Penggunaan prosedur tertentu diharapkan dapat mewakili populasinya. Langkah yang dilakukan dengan menentukan sampel masyarakat desa simpang tanjung kecamatan belimbing kabupaten muara enim yang setiap masyarakatnya mengetahui tentang Pemilihan Desa Perspektif oleh Muhammad Hatta.

Untuk menghemat waktu dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai masyarakat desa simpang tanjung kecamatan belimbing kabupaten muara enim yang mengetahui Pemilihan Desa Perspektif oleh Muhammad Hatta saja. Dan setelah menanyakan dengan kepala desa disana hanya beberapa orang tidak sampai 10 orang. Dan peneliti telah mewawancarai 5 narasumber ialah Ketua RW 08, sekertaris kepala desa, tokoh agama, masyarakat yang dapat memahami mengenai pemilihan kepala desa yang bertanggungjawab dan tidak menggunakan suap dalam pemilihan kepala desa simpang tanjung kecamatan belimbing kabupaten muara enim.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu membuat gambaran mengenai situasi kejadian atau pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan

gambaran yang benar dan jelas. Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan :²⁰

a. Idealisasi

Dengan bertitik tolak dari pengalaman dan data-data empiris, peneliti dapat mengkonstruksi gagasannya menjadi realisasi ideal untuk dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang objek material yang sedang ditelitinya.

b. Kesenambungan historis

Lingkaran historis memastikan pentingnya pemahaman akan sejarah dimana yang lama menjadi sungguh berharga tetapi mendapatkan makna barunya, sedangkan kebaruan makna itu tetap didasarkan dari yang lama.²¹

c. Deskripsi

Penelitian filosofis pada akhirnya harus dituangkan dalam tulisan dan dibahasakan secara logis dan sistematis agar gambaran utuh tentang objek yang telah diteliti dapat dibaca sebagai hasil runtutan pemikiran atas investigasi filosofis yang melahirkan wacana baru atau memperbarui wacana filosofis yang telah bergulir sebelumnya. Seluruh hasil penelitian harus dibahasakan, deskripsi merupakan salah satu unsur hakiki untuk menemukan *eidos* pada suatu fenomena tertentu.²²

F. Sistematika Pembahasan

²⁰ M. Suparmoko. *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: PBF, 1981), him. 1.

²¹ Muzairi, dkk, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: FA. Press, 2014), him. 29.

²² Anton Bakker, A Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), cet 16, him. 54.

Untuk memperoleh gambaran singkat mengenai penelitian ini, peneliti perlu mengetengahkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II; Berisi tentang Biografi Muhammad Hatta, Politik Muhammad Hatta mulai dari Teori *utilitarisme* tentang hak dan kewajibannya, Pemilihan Kepala Desa, Tugas Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa dalam azas pemilihan umum ditinjau dari Muhammad Hatta dan Pemilihan Kepala Desa dalam Perundang-undangan Indonesia.

BAB III; Mengenai gambaran umum lokasi, meliputi sejarah dan letak geografis Desa Simpang Tanjung, Deskripsi tentang keadaan penduduk ialah mengenai perkembangan kependudukan, jumlah penduduk, jumlah keluarga, ekonomi masyarakat, pengangguran, kesejahteraan keluarga, produk domestik desa, pendidikan, ekonomi, aspek keagamaan budaya.

BAB IV; Merupakan Fenomena perilaku masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa simpang tanjung kecamatan belimbing kabupaten muara enim mengenai Perilaku politik masyarakat desa simpang tanjung dalam pemilihan kepala Desa di Desa Simpang Tanjung dan Relevansi Pemikiran Muhammad Hatta terhadap Kepala Desa Simpang Tanjung.

BAB V, Berisikan kesimpulan dan saran